

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Pondok Pesantren Tradisional

Menurut asal katanya pesantren berasal dari kata "santri" yang mendapat imbuhan awalan "pe" dan akhiran "an" yang menunjukkan tempat, maka artinya adalah tempat para santri. Terkadang pula pesantren dianggap sebagai gabungan dari kata "santri" (manusia baik) dengan suku kata "tra" (suka menolong) sehingga kata pesantren dapat diartikan tempat pendidikan manusia baik-baik (Zarkasy, 1998: 106).

Lebih jelas dan sangat terinci sekali Madjid (1997 : 19-20) mengupas asal usul perkataan santri, ia berpendapat "Santri itu berasal dari perkataan "sastri" sebuah kata dari Sansekerta, yang artinya melek huruf, dikonotasikan dengan kelas literary bagi orang Jawa yang disebabkan karena pengetahuan mereka tentang agama melalui kitab-kitab yang bertuliskan dengan bahasa Arab. Kemudian diasumsikan bahwa santri berarti orang yang tahu tentang agama melalui kitab-kitab berbahasa Arab dan atau paling tidak santri bisa membaca al-Qur'an, sehingga membawa kepada sikap lebih serius dalam memandang agama. Juga perkataan santri berasal dari bahasa Jawa "cantrik" yang berarti orang yang selalu mengikuti guru kemana guru pergi menetap (istilah pewayangan) tentunya dengan tujuan agar dapat belajar darinya mengenai keahlian tertentu.

Pesantren juga dikenal dengan tambahan istilah pondok yang dalam arti kata bahasa Indonesia mempunyai arti kamar, gubug, rumah kecil dengan menekankan kesederhanaan bangunan atau pondok juga berasal dari bahasa Arab "Fundūq" yang berarti ruang tidur, wisma, hotel sederhana, atau mengandung arti tempat tinggal yang terbuat dari bambu (Zarkasy, 1998: 105-106).

Pesantren atau lebih dikenal dengan istilah pondok pesantren dapat diartikan sebagai tempat atau kompleks para santri untuk belajar atau mengaji ilmu pengetahuan agama kepada kiai atau guru ngaji, biasanya kompleks itu berbentuk asrama atau kamar-kamar kecil dengan bangunan apa adanya yang menunjukkan kesederhanaannya.

Pengertian pondok pesantren secara terminologis cukup banyak dikemukakan para ahli. Beberapa ahli tersebut adalah:

1. Dhofier (1994: 84) mendefinisikan bahwa pondok pesantren adalah lembaga pendidikan tradisional Islam untuk mempelajari, memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran Islam dengan menekankan pentingnya moral keagamaan sebagai pedoman perilaku sehari-hari.
2. Nasir (2005: 80) mendefinisikan bahwa pondok pesantren adalah lembaga keagamaan yang memberikan pendidikan dan pengajaran serta mengembangkan dan menyebarkan ilmu agama Islam.
3. Team Penulis Departemen Agama (2003: 3) dalam buku *Pola Pembelajaran Pesantren* mendefinisikan bahwa pondok pesantren adalah pendidikan dan pengajaran Islam di mana di dalamnya terjadi interaksi

antara kiai dan ustdaz sebagai guru dan para santri sebagai murid dengan mengambil tempat di masjid atau di halaman-halaman asrama (pondok) untuk mengkaji dan membahas buku-buku teks keagamaan karya ulama masa lalu. Dengan demikian, unsur terpenting bagi pesantren adalah adanya kiai, para santri, masjid, tempat tinggal (pondok) serta buku-buku (kitab kuning).

4. Rabithah Ma'ahid Islamiyah (RMI) mendefinisikan pesantren sebagai lembaga *tafaqquh fi al-dîn* yang mengemban misi meneruskan risalah Muhammad SAW sekaligus melestarikan ajaran Islam yang berhaluan *Ahlu al-sunnah wa al-Jamā'ah 'alā Ṭaiṭiqah al-Mazāhib al-'Arba'ah*.
5. Mastuhu (1994: 6) mendefinisikan bahwa pondok pesantren adalah lembaga tradisional Islam untuk memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam (*tafaqquh fi al-dîn*) dengan menekankan pentingnya moral agama Islam sebagai pedoman hidup bermasyarakat sehari-hari.
6. Arifin (1995: 240) mendefinisikan pondok pesantren sebagai suatu lembaga pendidikan agama Islam yang tumbuh serta diakui oleh masyarakat sekitar, dengan sistem asrama (kampus) di mana menerima pendidikan agama melalui sistem pengajian atau madrasah yang sepenuhnya berada di bawah kedaulatan dari kepemimpinan (*leadership*) seorang atau beberapa orang kiai dengan ciri-ciri khas yang bersifat kharismatik serta independen dalam segala hal.

Sedangkan pesantren tradisional merupakan jenis pesantren yang tetap mempertahankan pengajaran kitab-kitab Islam klasik sebagai inti pendidikannya (Asrohah, 1999 : 59).

Menurut Mastuhu (1994: 55) pondok pesantren adalah suatu lembaga pendidikan tradisional Islam untuk mempelajari, memahami, mendalami, menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam dengan menekankan pentingnya moral keagamaan sebagai pedoman perilaku sehari-hari

Dari berbagai pengertian di atas, maka dapat dipahami bahwa pesantren adalah lembaga pendidikan Islam tradisional yang mempelajari ilmu agama (*tafaqquh fi al-dîn*) dengan penekanan pada pembentukan moral santri agar bisa mengamalkannya dengan bimbingan kiai dan menjadikan kitab kuning sebagai sumber primer serta masjid sebagai pusat kegiatan.

B. Sejarah Pondok Pesantren

Tidak jelas dan tidak banyak referensi yang menjelaskan tentang asal usul pesantren, tentang kapan awal berdirinya bagaimana proses berdirinya dan bahkan istilah-istilah yang ada dalam dunia pesantren pun seperti istilah kiai, santri yang menjadi unsurnya masih diperselisihkan.

Mengenai asal usul dan latar belakang berdirinya pesantren di Indonesia menurut Ensiklopedi Islam ada dua versi pendapat. *Pertama*; Pendapat yang menyebutkan bahwa pesantren berakar pada tradisi Islam sendiri, yaitu tradisi tarekat. Karena pesantren mempunyai kaitan yang erat dengan tempat pendidikan yang khas bagi kaum sufi. Pendapat ini didasarkan bahwa dalam awal penyiaran Agama Islam di Indonesia lebih dikenal dengan

kegiatan tarekat, yang ditandai dengan munculnya kelompok-kelompok organisasi tarekat yang melaksanakan zikir dan wirid tertentu. Pemimpin tarekat ini disebut kiai, yang dalam melaksanakan suluk dilakukan selama 40 hari tinggal bersama kiai di sebuah Masjid untuk dibimbing dalam melakukan ibadah-ibadah tertentu. Di samping itu kiai juga biasanya menyediakan kamar-kamar kecil yang letaknya di kiri kanan Masjid untuk tempat penginapan dan memasak. Sehingga dalam kesehariannya juga diajarkan kitab-kitab agama, yang kemudian aktifitas ini dinamakan pengajian. Dalam perkembangannya lembaga pengajian tarekat ini tumbuh dan berkembang menjadi lembaga pesantren.

Kedua, pendapat yang menyebutkan bahwa pesantren yang kita kenal sekarang merupakan pengambilalihan sistem pendidikan yang diadakan oleh orang-orang Hindu di Nusantara. Pendapat ini didasarkan dengan adanya fakta bahwa sebelum Islam datang ke Indonesia telah dijumpai lembaga pendidikan yang sama dengan pesantren, Lembaga itu digunakan untuk mengajarkan ajaran agama Hindu dan tempat untuk membina kader-kader penyebar Hindu. Fakta lain, adalah bahwa sistem pendidikan semacam pesantren ini, tidak kita jumpai di negara-negara Islam, sementara justru lembaga yang hampir sama dengan pesantren, dapat kita jumpai di negara-negara Hindu dan Budha, seperti India, Thailand dan Myanmar (Dewan Redaksi, 1993: 100).

Deskripsi tentang perkembangan pesantren tidak bisa terlepas dengan penyebaran dan penyiaran Agama Islam di bumi Indonesia ini, sehingga

dalam mengkaji perkembangan pesantren ini dapat dikelompokkan menjadi beberapa fase, yaitu :

1. Fase masuknya Islam ke Indonesia
2. Fase penjajahan Belanda
3. Fase penjajahan Jepang
4. Fase Indonesia merdeka (Zarkasy, 1998: 106)

Untuk lebih mengetahui perkembangan pesantren, akan penulis jelaskan keadaan dan kondisi pesantren pada masing-masing fase tersebut.

1. Fase masuknya Islam ke Indonesia

Berdirinya dan perkembangan pesantren, tidak dapat dipisahkan dengan zaman Walisongo, sehingga tidak berlebihan bila dikatakan pondok pesantren yang pertama kali adalah pondok pesantren yang didirikan oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim. Syekh Maulana Malik Ibrahim yang wafat pada 12 Rabi'ul Awal 822 H bertepatan dengan 8 April 1419 M adalah orang pertama dari walisongo yang menyebarkan Agama Islam di Jawa (Wahjoetomo, 1997: 70-71), sehingga dapat disimpulkan bahwa lembaga pesantren itu sudah ada sejak abad ke-15.

Dalam perkembangan pesantren, tokoh yang dianggap berhasil mendirikan dan mengembangkan pesantren dalam arti yang sesungguhnya adalah Raden Rahmat (Sunan Ampel) yang telah mendirikan pesantren di Kembang Kuning, kemudian pindah ke Ampel Denta, Surabaya, dan mendirikan pesantren di sana, dan di sana misi keagamaan dan pendidikan mencapai sukses, sehingga setelahnya banyak bermunculan pesantren-

pesantren yang didirikan oleh para santrinya, di antaranya adalah pondok pesantren Giri yang didirikan oleh Sunan Giri, pesantren Demak oleh Raden Fatah, pesantren Tuban oleh Sunan Bonang (Wahjoetomo, 1997: 70-71).

Keadaan dan kondisi pesantren pada masa awal masuknya Islam tidak seperti yang kita lihat sekarang, fungsi dan kedudukannya pun tidak sekompleks sekarang, pada saat itu pesantren hanya berfungsi sebagai alat Islamisasi dan sekaligus memadukan tiga unsur pendidikan, yakni ibadah untuk menanamkan iman, *tablig* untuk menyebarkan ilmu dan amal untuk mewujudkan kegiatan kemasyarakatan dalam kehidupan sehari-hari (Wahjoetomo, 1997: 70-71).

2. Fase Penjajahan Belanda

Penaklukan Belanda atas bangsa Indonesia, telah menyebabkan adanya proses *westernisasi* di berbagai bidang, termasuk pula dalam bidang pendidikan, dengan beralih pembaharuan mereka menyelinapkan misi kristenisasi untuk kepentingan Barat dan agama Nasrani.

Tujuan itulah yang kemudian memunculkan kebijakan-kebijakan yang dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan pesantren, dengan peraturan-peraturan yang dibuat, mereka berusaha untuk menyudutkan dan meminggirkan lembaga-lembaga pendidikan yang ada, khususnya pesantren.

Pemerintah Kolonial mengeluarkan kebijakan bahwa sekolah-sekolah gereja diwajibkan sebagai sekolah pemerintah dan tiap-tiap daerah

karisedenan minimal harus ada satu sekolah yang mengajarkan agama Kristen, agar penduduk pribumi lebih mudah untuk menaati undang-undang dan hukum negara (Zarkasy, 1998: 110-111).

Pendidikan gereja ini didirikan oleh pemerintah Belanda dengan tujuan selain mempunyai misi kristenisasi juga untuk menandingi lembaga pendidikan yang sudah ada, seperti pesantren, madrasah-madrasah dan pengajian yang sangat melekat di hati rakyat, karena pemerintah Belanda menganggap pendidikan yang telah ada sudah tidak relevan dan tidak membantu pemerintah Belanda dalam misi kolonialisme (Zarkasy, 1998: 111).

Pemerintah Belanda berusaha menyudutkan lembaga pendidikan Islam dengan membuat kebijakan-kebijakan yang melarang kiai untuk memberikan pengajaran agama kecuali ada izin dari pemerintah. Pemerintah Belanda melakukan penutupan terhadap madrasah-madrasah dan pesantren-pesantren yang tidak memiliki izin dari pemerintah. Kebijakan ini ditekankan karena pemerintah Belanda melihat adanya kekhawatiran dengan menguatnya gerakan nasionalisme-islamisme dengan munculnya persatuan pondok-pondok pesantren dan lembaga organisasi pendidikan Islam, dan juga perkembangan agama Kristen yang selalu mendapat reaksi keras dari rakyat (Zarkasy, 1998: 111).

Kebijakan-kebijakan kolonial yang senantiasa berusaha untuk menghambat dan bahkan menghancurkan pendidikan Islam, telah menyebabkan kekhawatiran, kemarahan, kebencian dan pemberontakan

kepada pemerintah Belanda yang oleh kalangan pesantren dimanifestasikan dalam tiga bentuk aksi, yaitu :

- a. *'Uzlah*, pengasingan diri, menyingkir ke desa-desa terpencil yang jauh dari jangkauan suasana kolonial. Hal ini dimaksudkan selain untuk menghindarkan dari kebijakan-kebijakan kolonial Belanda, juga untuk menjaga diri dari pengaruh moral dan kebudayaan yang destruktif.
- b. Bersikap *non kooperatif* dan mengadakan perlawanan secara diam-diam, hal ini dilakukan oleh para kiai yang mengajarkan pendidikan keagamaan dengan menumbuhkan semangat jihad para santri-santrinya untuk membela Islam dan menentang penjajah. Dengan fatwa-fatwanya semacam membela negara dari ancaman penjajah, lebih lagi kafir adalah bagian dari iman, bahkan sampai fatwa yang mengharamkan segala sesuatu yang berasal dan berbau barat seperti, memakai celana, dasi, sepatu dan lainnya.
- c. Berontak dan mengadakan perlawanan fisik terhadap Belanda, dengan silih berganti selama berabad-abad kalangan pesantren senantiasa berjuang mengusir penjajah dari bumi nusantara ini sehingga lahirlah nama-nama pejuang besar yang berlatar belakang santri seperti Imam Bonjol, Pangeran Antasari, Sultan Agung, Ahmad Lucy (Pattimura) dan lainnya (Wahjoetomo, 1997: 77-78).

Keadaan pesantren pada masa penjajahan Belanda banyak mengalami kemunduran disebabkan adanya tekanan yang dilakukan pemerintah Belanda terhadap pesantren. Sehingga pesantren menjadi

terpinggirkan, dan pesantren tidak bisa konsentrasi penuh dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan, lembaga dakwah dan lembaga sosial, karena pesantren harus ikut berjuang dalam rangka memerangi kolonialisme Belanda dari bumi nusantara ini. Namun di sisi lain, hal ini menunjukkan daya tahan pesantren. Walaupun pemerintah Belanda secara maksimal berusaha untuk membatasi gerak pesantren melalui tekanan, ancaman, dan kebijakan yang sangat merugikan pesantren ternyata pesantren masih tetap eksis di tengah-tengah gelora perjuangan melepaskan diri dari kekangan penjajah Barat (Belanda)

Bahkan pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, lahir kegairahan dan semangat baru dari kalangan muslim, pesantren berusaha keluar dari ketertinggalannya, dipelopori oleh para kiai muda yang baru menyelesaikan studinya di Mekah, berusaha membuka sistem pendidikan yang sebanding dengan sistem sekolah, yaitu sistem madrasah. Dengan sistem ini pesantren dapat berkembang kembali dengan baik dan cepat, dan mampu menyaingi sekolah-sekolah Belanda seperti contoh pesantren Tebu Ireng yang memiliki lebih dari 1500 santri (Wahjoetomo, 1997: 77-78).

Selain itu, kaum santri juga mengalami tumbuhnya kesadaran untuk bersatu dan mengatur dirinya secara baik, sehingga bermunculan organisasi-organisasi Islam, seperti SI (Serikat Islam), Muhammadiyah dan NU. Organisasi-organisasi itu bertujuan untuk membela dan meningkatkan kualitas beragama, bermasyarakat dan bernegara.

3. Fase Penjajahan Jepang

Jepang menjajah Indonesia setelah menguasai pemerintah Hindia Belanda dalam perang dunia II, mereka menguasai Indonesia pada tahun 1942, dengan membawa semboyan Asia Timur Raya untuk Asia dan semboyan Asia Baru.

Pada awalnya sikap pemerintahan Jepang menampilkan sikap yang sangat menguntungkan Islam, seakan-akan membela kepentingan Islam. Sikap tersebut ternyata hanyalah siasat Jepang untuk memanfaatkan kekuatan Islam dan nasionalis untuk kepentingan perang Asia Timur Raya yang dipimpin oleh Jepang, sehingga Jepang berusaha menarik simpati dari kalangan Islam dengan kebijakan-kebijakannya, di antaranya adalah:

- a. Kantor urusan agama yang pada Zaman Belanda disebut kantor *Voor Islamistische Saken* yang dipimpin oleh orang-orang orientalis Belanda, diubah oleh Jepang menjadi kantor *Sumubi* yang dipimpin oleh ulama Islam sendiri, yaitu KH. Hasyim Asy'ari dan di daerah juga dibentuk Sumuka yang juga dipegang oleh kalangan Islam.
- b. Pondok pesantren yang besar seringkali mendapat kunjungan dan bantuan dari pembesar-pembesar Jepang.
- c. Sekolah negeri diberi pelajaran Budi Pekerti yang isinya identik dengan ajaran agama.
- d. Umat Islam diizinkan meneruskan organisasi persatuan yang disebut Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI) yang bersifat kemasyarakatan (Zuhairini, dkk., 1986: 150).

Kebijakan-kebijakan Jepang sebagaimana tersebut di atas, sedikit memberikan ruang gerak bagi pertumbuhan pesantren dan pendidikan madrasah, Namun, itu tidak berlangsung lama, karena setelah mendapat tekanan dari pihak sekutu, pemerintah Jepang bertindak sewenang-wenang dan bahkan lebih kasar dan kejam dari pada pemerintah Hindia Belanda. Kegiatan sekolah diberhentikan diganti dengan kegiatan baris-berbaris dan latihan perang untuk membantu Jepang, sehingga para kiai banyak yang ditangkap akibat melakukan pembangkangan dan pemberontakan.

Demikian juga, pondok pesantren tidak boleh banyak bergerak meskipun pengawasan yang dilakukan bersifat wajar. Masa-masa ini tidak berlangsung lama karena pemerintah Jepang semakin terjepit akibat kalah perang dengan sekutu. Hingga akhirnya Indonesia memproklamkan kemerdekaannya.

4. Fase Kemerdekaan Indonesia

Setelah Indonesia merdeka dari penjajahan Belanda dan Jepang, pemimpin bangsa Indonesia memulihkan kembali dan berusaha mengembangkan pendidikan di Indonesia sesuai dengan kebudayaan asli bangsa Indonesia. Pondok-pondok pesantren yang pada masa penjajahan kurang mendapatkan kebebasan dan mengembangkan misinya, mulai bermunculan dan berusaha untuk senantiasa eksis dan berbenah diri untuk meningkatkan daya saingnya bersama lembaga-lembaga lain.

Pondok pesantren pada masa ini yang merupakan lembaga pendidikan yang bersifat non formal mulai mengadakan perubahan-

perubahan guna menghasilkan generasi-generasi yang tangguh, yang berpengalaman luas, di antaranya dengan memasukkan mata pelajaran non agama ke dalam kurikulum pesantren, sebagian juga ada yang memasukkan pelajaran bahasa asing ke dalam kurikulum wajib di pondok pesantren.

Demikian pula pesantren mulai mengembangkan sayapnya dengan memperbaharui sistem klasikal dalam pengajarannya, mendirikan madrasah-madrasah, sekolah umum dan bahkan ada sebagian pondok pesantren yang memiliki perguruan tinggi. Pondok pesantren mulai membuka diri dari berbagai masukan dan kritikan yang bersifat membangun dan tidak menyimpang dari agama Islam, sehingga pembaharuan di sana sini terus dilakukan oleh pesantren.

Hal ini akan merubah penafsiran bahwa pesantren itu identik dengan kekolotan, tradisional, bangunannya yang sempit, kumuh dan terisolasi di pedesaan kepada pandangan yang menilai bahwa pesantren adalah lembaga pendidikan yang unggul dan dapat dibanggakan, yang bisa menjadi alternatif sistem pendidikan modern.

Kalau peneliti lihat alumni-alumni pondok pesantren saat sekarang ini sudah banyak yang sukses berkecimpung di berbagai bidang, mulai dari kalangan elite sampai di bawah. Ini menunjukkan besarnya peranan pesantren dalam ikut andil menyukseskan pembangunan bangsa Indonesia.

Pesantren pada masa orde baru mendapat perhatian yang besar dari pemerintah yang senantiasa mendorong agar pesantren dapat menjadi

salah satu agen perubahan dan pembangunan masyarakat. Pembaharuan-pembaharuan yang dilakukan ini tidak lain bertujuan agar pesantren dalam masa ini mengarah pada pengembangan pandangan dunia dan substansi pendidikan pesantren agar lebih responsif terhadap kebutuhan tantangan zaman. Di samping itu, juga diarahkan untuk fungsionalisasi pesantren sebagai salah satu pusat penting bagi pembangunan masyarakat secara keseluruhan. Sebagai pusat penyuluhan, pusat kesehatan, pusat pengembangan teknologi tepat guna, pusat pemberdayaan ekonomi dan lain sebagainya.

Oleh karena itu pesantren untuk masa sekarang dan yang akan datang harus dapat dijadikan wahana dalam melanjutkan perjuangan, yakni berjuang melalui pembangunan jasmani dan rohani, terutama di pedesaan yang merupakan tempat tinggal sebagian besar rakyat Indonesia.

C. Elemen-Elemen Pondok Pesantren Tradisional

Dhofier (1994: 44) mengungkapkan bahwa lembaga pendidikan pesantren memiliki beberapa elemen dasar yang merupakan ciri khas dari pesantren itu sendiri, elemen itu adalah:

1. Pondok atau asrama
2. Tempat belajar mengajar, biasanya berupa Masjid dan bisa berbentuk lain.
3. Santri
4. Pengajaran kitab-kitab agama, bentuknya adalah kitab-kitab yang berbahasa arab dan klasik atau lebih dikenal dengan istilah kitab kuning.
5. Kiai dan ustadz.

Untuk lebih jelasnya akan penulis berikan penjelasan tentang elemen-elemen pesantren tersebut di atas sebagai berikut :

1. Pondok atau Asrama

Dalam tradisi pesantren, pondok merupakan unsur penting yang harus ada dalam pesantren. Pondok merupakan asrama di mana para santri tinggal bersama dan belajar di bawah bimbingan kiai. Pada umumnya pondok ini berupa kompleks yang dikelilingi oleh pagar sebagai pembatas yang memisahkan dengan lingkungan masyarakat sekitarnya. Namun ada pula yang tidak terbatas bahkan kadang berbaur dengan lingkungan masyarakat (Dewan Redaksi, 1993: 103).

Bangunan pondok pada tiap pesantren berbeda-beda, berapa jumlah unit bangunan secara keseluruhan yang ada pada setiap pesantren ini tidak bisa ditentukan, tergantung pada perkembangan dari pesantren tersebut. Pada umumnya pesantren membangun pondok secara tahap demi tahap, seiring dengan jumlah santri yang masuk dan menuntut ilmu di situ.

Pembiayaannya pun berbeda-beda, ada yang didirikan atas biaya kiaiinya, atas kegotong royongan para santri, dari sumbangan masyarakat, atau bahkan sumbangan dari pemerintah.

Walaupun berbeda dalam hal bentuk, dan pembiayaan pembangunan pondok pada masing-masing pesantren tetapi terdapat kesamaan umum, yaitu kewenangan dan kekuasaan mutlak atas pembangunan dan pengelolaan pondok dipegang oleh kiai yang memimpin pesantren tersebut.

Dengan kondisi sebagaimana tersebut di atas, maka menyebabkan ditemuinya bentuk, kondisi atau suasana pesantren tidak teratur, kelihatan tidak direncanakan secara matang seperti layaknya bangunan-bangunan modern yang bermunculan di zaman sekarang. Hal inilah yang menunjukkan ciri khas dari pesantren itu sendiri, bahwa pesantren penuh dengan nuansa kesederhanaan, apa adanya. Namun akhir-akhir ini banyak pesantren yang mencoba untuk menata tata ruang bangunan pondoknya disesuaikan dengan perkembangan zaman.

2. Masjid

Masjid merupakan elemen yang tidak dapat dipisahkan dengan pesantren, masjid adalah bangunan sentral sebuah pesantren, dibanding bangunan lain, masjidlah tempat serbaguna yang selalu ramai atau paling banyak menjadi pusat kegiatan warga pesantren.

Masjid yang mempunyai fungsi utama untuk tempat melaksanakan shalat berjamaah, melakukan wirid dan do'a, i'tikaf dan tadarus al-Qur'an atau yang sejenisnya (Bawani, 1993: 91-92). Namun bagi pesantren dianggap sebagai tempat yang tepat untuk mendidik para santri, terutama dalam praktek sembahyang lima waktu, khutbah dan pengajaran kitab-kitab agama klasik.

Seorang kiai yang ingin mengembangkan sebuah pesantren biasanya pertama-tama akan mendirikan Masjid di dekat rumahnya. Hal ini dilakukan karena kedudukan masjid sebagai sebuah pusat pendidikan dalam tradisi Islam merupakan manifestasi universalisme dari sistem

pendidikan Islam tradisional. Dengan kata lain, kesinambungan sistem pendidikan Islam yang berpusat pada Masjid *al-Quba* yang didirikan di dekat Madinah pada masa Nabi Muhammad SAW, dan juga dianut pada zaman setelahnya, tetap terpancar dalam sistem pendidikan pesantren sehingga lembaga-lembaga pesantren terus menjaga tradisi ini (Dhofier, 1994: 49).

Bahkan bagi pesantren yang menjadi pusat kegiatan thariqah masjid memiliki fungsi tambahan, yaitu digunakan untuk tempat amaliyah ke-tasawuf-an seperti dzikir, wirid, bai'ah, tawajjuh dan lainnya.

3. Santri

Istilah "santri" mempunyai dua konotasi atau pengertian, *pertama*; dikonotasikan dengan orang-orang yang taat menjalankan dan melaksanakan perintah agama Islam, atau dalam terminologi lain sering disebut sebagai "muslim orotodoks". Istilah "santri" dibedakan secara kontras dengan kelompok abangan, yakni orang-orang yang lebih dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya Jawa pra Islam, khususnya nilai-nilai yang berasal dari mistisisme Hindu dan Budha (Raharjo (ed), 1986: 37). *Kedua*; dikonotasikan dengan orang-orang yang tengah menuntut ilmu di lembaga pendidikan pesantren. Keduanya jelas berbeda, tetapi jelas pula kesamaannya, yakni sama-sama taat dalam menjalankan syariat Islam (Bawani, 1993: 93).

Santri dalam dunia pesantren dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu :

a. Santri Mukim

Adalah santri yang selama menuntut ilmu tinggal di dalam pondok yang disediakan pesantren, biasanya mereka tinggal dalam satu kompleks yang berwujud kamar-kamar. Satu kamar biasanya di isi lebih dari tiga orang, bahkan terkadang sampai 10 orang lebih.

b. Santri Kalong

Adalah santri yang tinggal di luar komplek pesantren, baik di rumah sendiri maupun di rumah-rumah penduduk di sekitar lokasi pesantren, biasanya mereka datang ke pesantren pada waktu ada pengajian atau kegiatan-kegiatan pesantren yang lain (Dewan Redaksi, 1993: 105).

Para santri yang belajar dalam satu pondok biasanya memiliki rasa solidaritas dan kekeluargaan yang kuat baik antara santri dengan santri maupun antara santri dengan kiai. Situasi sosial yang berkembang di antara para santri menumbuhkan sistem sosial tersendiri, di dalam pesantren mereka belajar untuk hidup bermasyarakat, berorganisasi, memimpin dan dipimpin, dan juga dituntut untuk dapat mentaati dan meneladani kehidupan kiai, di samping bersedia menjalankan tugas apapun yang diberikan oleh kiai, hal ini sangat dimungkinkan karena mereka hidup dan tinggal di dalam satu komplek.

Dalam kehidupan kesehariannya mereka hidup dalam nuansa religius, karena penuh dengan amaliah keagamaan, seperti puasa, sholat malam dan sejenisnya, nuansa kemandirian karena harus mencuci, memasak makanan sendiri, nuansa kesederhanaan karena harus berpakaian

dan tidur dengan apa adanya. Serta nuansa kedisiplinan yang tinggi, karena adanya penerapan peraturan-peraturan yang harus dipegang teguh setiap saat, bila ada yang melanggarnya akan dikenai hukuman, atau lebih dikenal dengan istilah ta'zirat seperti digundul, membersihkan kamar mandi dan lainnya.

4. Pengajaran Kitab-Kitab Agama Klasik

Salah satu ciri khusus yang membedakan pesantren dengan lembaga-lembaga pendidikan yang lain adalah adanya pengajaran kitab-kitab agama klasik yang berbahasa Arab, atau yang lebih populer disebut dengan "kitab kuning".

Meskipun kini, dengan adanya berbagai pembaharuan yang dilakukan di pesantren dengan memasukkan pengajaran pengetahuan umum sebagai suatu bagian penting dalam pendidikan pesantren, namun pengajaran kitab-kitab Islam klasik terutama karangan-karangan ulama yang menganut faham Syafi'iyah tetap diberikan di pesantren sebagai usaha untuk meneruskan tujuan utama pesantren, yaitu mendidik calon-calon ulama, yang setia kepada faham Islam tradisional.

Spesifikasi kitab dilihat dari formatnya terdiri dari dua bagian : materi, teks asal (*inti*) dan *syarh* (komentar, teks penjelas atas materi). Dalam pembagian semacam ini, materi selalu diletakkan di bagian pinggir (*margin*) sebelah kanan maupun kiri, sementara *syarh* karena penuturannya jauh lebih banyak dan panjang diletakkan di bagian tengah kitab kuning (Wahid, 1999: 233).

Bila dilihat dari segi cabang keilmuannya dapat dikelompokkan menjadi 8 kelompok, yaitu; a. *naḥwu* (*syintaq*) dan *ṣaraf* (morfologi); b. *fiqh*; c. *uṣūl fiqh*; d. hadits; e. tafsir; f. tauhid; g. tasawuf dan etika; h. cabang-cabang lain seperti *tarikh* dan *balāgh* (Wahid, 1999: 233).

Ciri khas lain dalam kitab kuning adalah kitab tersebut tidak dilengkapi dengan sandangan (*syakal*) sehingga kerap kali di kalangan pesantren disebut dengan istilah ”*kitab gundul*”. Hal ini kemudian berakibat pada metode pengajarannya yang bersifat tekstual dengan metode, sorogan dan bandongan.

5. Kiai atau Ustadz

Keberadaan kiai dalam lingkungan pesantren merupakan elemen yang cukup esensial. Laksana jantung bagi kehidupan manusia begitu urgen dan pentingnya kedudukan kiai, karena dialah yang merintis, mendirikan, mengelola, mengasuh, memimpin dan terkadang pula sebagai pemilik tunggal dari sebuah pesantren.

Oleh karena itu, pertumbuhan suatu pesantren sangat bergantung kepada kemampuan pribadi kiainya, sehingga menjadi wajar bila kita melihat adanya banyak pesantren yang bubar, lantaran ditinggal wafat kiainya, sementara dia tidak memiliki keturunan yang dapat meneruskan kepemimpinannya.

Gelar kiai, sebagaimana diungkapkan Mukti Ali yang dikutip Bawani (1993: 90), biasanya diperoleh seseorang berkat kedalaman ilmu keagamaannya, kesungguhan perjuangannya di tengah umat,

kekhusyuan'annya dalam beribadah, dan kewibawaannya sebagai pemimpin. Sehingga semata hanya karena faktor pendidikan tidak dapat menjamin bagi seseorang untuk memperoleh predikat kiai, melainkan faktor bakat dan seleksi alamiah yang lebih menentukannya.

Di masyarakat, kiai merupakan bagian dari kelompok elite dalam struktur sosial, politik dan ekonomi, yang memiliki pengaruh yang amat kuat di masyarakat, biasanya mereka memiliki suatu posisi atau kedudukan yang menonjol baik pada tingkat lokal maupun nasional. Dengan demikian kiai merupakan pembuat keputusan yang efektif dalam sistem kehidupan sosial, tidak hanya dalam kehidupan keagamaan tetapi juga dalam soal-soal politik.

Dengan kelebihan pengetahuannya dalam bidang agama, para kiai seringkali dianggap sebagai orang yang senantiasa dapat memahami keagungan Tuhan dan rahasia alam sehingga mereka dianggap memiliki kedudukan yang tidak terjangkau oleh kebudayaan orang awam, atau dalam istilah lazimnya disebut "kiai khos" sehingga dalam beberapa hal mereka menunjukkan kekhususan mereka dalam bentuk pakaian seperti kopiah dan surban serta jubah sebagai simbol kealiman.

Di lingkungan pesantren, seorang kiai adalah hirarki kekuasaan satu-satunya yang ditegakkan di atas kewibawaan moral sebagai penyelamat para santri dari kemungkinan melangkah ke arah kesesatan, kekuasaan ini memiliki perwatakan absolut sehingga santri senantiasa terikat dengan kiainya seumur hidupnya, minimal sebagai sumber inspirasi

dan sebagai penunjang moral dalam kehidupan pribadinya (Wahid, 2001: 6-7).

Dari uraian tersebut, perlu diingat bahwa yang digambarkan adalah pesantren yang masih dalam bentuknya yang murni, atau dalam studi kepesantrenan disebut dengan istilah pesantren tradisional, sehingga kalau kita menongok perkembangan pesantren saat sekarang tentunya akan dapat kita lihat usaha-usaha untuk mendorong terjadinya perubahan pada unsur-unsur pesantren, disesuaikan dengan dinamika dan kemajuan zaman.

D. Sistem Pendidikan dan Pengajaran Pondok Pesantren Tradisional

Sebagaimana dijelaskan di depan bahwa komponen pesantren salah satunya adalah berupa pondok atau tempat tinggal, sehingga dapat dipahami bahwa sistem pendidikan yang digunakan adalah sistem asrama, di mana santri tinggal satu kompleks bersama kiai, dan juga adanya pengajaran kitab-kitab klasik, yang berbahasa Arab yang tentunya dalam memahaminya diperlukan adanya metode-metode khusus yang menjadi ciri khas dari pondok pesantren.

Pesantren sebagaimana kita ketahui, biasanya didirikan oleh perseorangan (kiai) sebagai figur sentral yang berdaulat dalam mengelola dan mengaturnya. Hal ini, menyebabkan sistem yang digunakan di pondok pesantren, berbeda antara satu dan yang lainnya. Mulai dari tujuan, kitab-kitab (atau materi) yang diajarkan, dan metode pengajarannya pun berbeda. Namun secara garis besar terdapat kesamaan.

Pesantren sebagai lembaga pendidikan tradisional, pada umumnya tidak memiliki rumusan tujuan pendidikan secara rinci, dijabarkan dalam sebuah sistem pendidikan yang lengkap dan konsisten direncanakan dengan baik. Namun secara garis besar, tujuan pendidikan pesantren dapat diasumsikan sebagai berikut :

1. Tujuan Umum, yaitu untuk membimbing anak didik (santri) untuk menjadi manusia yang berkepribadian islami yang sanggup dengan ilmu agamanya menjadi mubalig Islam dalam masyarakat sekitar melalui ilmu dan amalnya.
2. Tujuan khusus, yaitu mempersiapkan para santri untuk menjadi orang yang alim dalam ilmu agama yang diajarkan oleh kiai yang bersangkutan serta mengamalkannya dalam masyarakat (Arifin, 1991: 110-111).

Untuk mewujudkan tujuan tersebut di atas, pesantren menyelenggarakan proses pembelajaran kitab yang dikenal dengan kitab kuning (kitab-kitab agama Islam klasik). Dalam penggunaan kitab kuning di pesantren tidak ada ketentuan yang harus mewajibkan kitab-kitab tertentu, biasanya hal ini disesuaikan dengan sistem pendidikan yang digunakan, ada yang hanya menggunakan sistem pengajian, tanpa sistem madrasah, ada yang sudah menggunakan sistem madrasah klasikal. Ada pula pesantren yang menggabungkan sistem pengajian dan sistem madrasah secara non klasikal (Wahid, 1999: 147-148).

Kitab-kitab yang diajarkan di pesantren yang dijadikan kurikulumnya meliputi kitab yang kecil dan pendek sampai kitab yang berjilid-jilid, sehingga

menurut (Dhofier, 1994: 50-51) dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu : 1. Kitab-kitab dasar; 2. Kitab-kitab tingkat menengah; 3. Kitab-kitab besar.

Diantara kitab-kitab tersebut yang populer digunakan, yang termasuk kitab dasar antara lain; *Bina' (şorf)*, *'Awâmil (naḥwu)*, *'Aqidât al- Awâm* (akidah), *Waşoya* (akhlak).

Kitab-kitab menengah meliputi *Amsilâṭ al-Taşrifîyyah (Şorf Tsanawiyah)*, *Kailâni, Maqşûd (Şorf Aliyah)*, *Jurumiyah*, *'Imriṭi, Mutammimah (Naḥwu Tsanawiyah)*, *Alfiyyah Ibnu 'Aqil (Naḥwu Aliyah)*, *Taqrîb, Safînah, Sullam al-Taufîq (Fiqh Tsanawiyah)*, *Bayan (Uşûl Fiqh Tsanawiyah-Aliyah)*, *Fath al-Mu'in, Fath al-Qarîb, Kifâyat al-Akhyâr, Fath al-Wahhâb*, Maḥalli, *Tahrîr (fiqh/Aliyah)*, *Kifâyat al-'Awâm, Jauhâr al-Tauhîd, al-Husûm al-Hamidiyah (akidah/ Tsanawiyah)*, *Jalâlain, Tafsîr Munir, Ibnu Katsîr, al-Itqân (Tafsîr-Ulûm al-Tafsîr/Aliyah)* *Bulûg al-Marâm, Şahîh Muslîm, Arba'in Nawâwi, Baiquniyah (Ḥadîts, Ulûm al-Ḥadîs/Tsanawiyah)*, *Riyâḍ al-Şalihîn, Durrât al-Nâşihîn, Minhâj al-Mughîs (Ḥadîs ulûm Ḥadîs /Aliyah)* *Ta'lîm al-Muta'alim, Bidâyatul al-Hidâyah (Akhlak/Tsanawiyah)*, *Iḥya'Ulûm al-Dîn, Risâlat al-Munawanah (Akhlak /Aliyah)*, *Khulâşah Nur al-Yaqîn (tarîkh)*.

Kitab *khawâs* (tinggi) meliputi, *Jam'u al-Jawâwi, Al-Asybâh wa al-Nadhâir (Uşûl Fiqh)*, *fathu al Majîd (Aqidah)*, *Jami' al-Bayan, al-Manâr, Şahîh Bukhâri (Ḥadîs)*.

Di samping kitab-kitab di atas, di pesantren juga biasanya terdapat amalan-amalan yang dilakukan dengan menggunakan kitab-kitab tertentu, di antaranya kitab manaqib Syekh Abdul Qodir Jaelani, kitab *Dalāil al-Khairāt*, kitab *Mujarabāt* yang biasanya dibaca sebagai wirid lelakon puasa dan lainnya.

Pelaksanaan pengajaran kitab ini dilakukan secara bertahap, dari kitab-kitab yang dasar yang merupakan kitab-kitab pendek dan sederhana, kemudian ketingkat lanjutan menengah dan baru setelah selesai menginjak kepada kitab-kitab takhasus, dan dalam pengajarannya dipergunakan metode-metode seperti, sorogan, bandongan, hafalan, mudzakaroh dan majlis ta'lim.

Untuk lebih jelasnya akan penulis paparkan masing-masing metode tersebut sebagaimana berikut :

1. Metode Hafalan

Metode hafalan adalah metode pengajaran dengan mengharuskan santri membaca dan menghafalkan teks-teks kitab yang berbahasa arab secara individual, biasanya digunakan untuk teks kitab nadhom, seperti aqidat al-awam, awamil, 'imriṭi, alfiyah dan lain-lain.

Dan untuk memahami maksud dari kitab itu guru menjelaskan arti kata demi kata dan baru dijelaskan maksud dari bait-bait dalam kitab nadhom. Dan untuk hafalan, biasanya digunakan istilah setor, yang mana ditentukan jumlahnya, bahkan kadang lama waktunya.

2. Metode Weton/Bandongan

Metode ini disebut weton, karena pengajiannya atas inisiatif kiai sendiri, baik dalam menentukan kitab, tempat, waktunya, dan disebut bandongan, karena pengajian diberikan secara berkelompok yang diikuti oleh seluruh santri (Wahjoetomo, 1997: 83).

Proses metode pengajaran ini adalah santri berbondong-bondong datang ke tempat yang sudah ditentukan oleh kiai, kiai membaca suatu kitab dalam waktu tertentu, dan santri membawa kitab yang sama sambil mendengarkan dan menyimak bacaan kiai, mencatat terjemahan dan keterangan kiai pada kitab itu yang disebut dengan istilah maknani, ngasahi atau njenggoti. Pengajian seperti ini dilakukan secara bebas, tidak terikat pada absensi, dan lama belajarnya, hingga tamatnya kitab yang di baca, tidak ada ujian, sehingga tidak bisa diketahui apakah santri sudah memahami atau belum tentang apa yang di baca oleh kiai.

3. Metode Sorogan

Metode ini, adalah metode pengajaran dengan sistem individual, prosesnya adalah santri dan biasanya yang sudah pandai, menyodorkan sebuah kitab kepada kiai untuk dibaca di depan kiai, dan kalau ada salahnya, kesalahan itu langsung dibetulkan oleh kiai (Ali, 1981: 19).

Di pondok pesantren, metode ini dilakukan hanya oleh beberapa santri saja, yang biasanya terdiri dari keluarga kiai atau santri-santri tertentu yang sudah dekat dengan kiai atau yang sudah dianggap pandai oleh kiai dan diharapkan di kemudian hari menjadi orang alim.

Dari segi teori pendidikan, metode ini sebenarnya metode modern, karena kalau kita pahami prosesnya, ada beberapa kelebihan di antaranya, antara kiai-santri saling kenal mengenal, kiai memperhatikan perkembangan belajar santri, dan santri juga berusaha untuk belajar aktif dan selalu mempersiapkan diri. Di samping kiai mengetahui materi dan metode yang sesuai untuk santrinya. Dalam belajar dengan metode ini tidak ada unsur paksaan, karena timbul dari kebutuhan santri sendiri.

4. Metode Mudzakaroh / Musyawarah.

Metode mudzakaroh atau musyawarah adalah sistem pengajaran dengan bentuk seminar untuk membahas setiap masalah keagamaan atau berhubungan dengan pelajaran santri, biasanya hanya untuk santri tingkat tinggi (Dewan Redaksi, 1993: 104).

Metode ini menuntut keaktifan santri, prosesnya santri di sodori masalah keagamaan tertentu atau kitab tertentu, kemudian santri diperintahkan untuk mengkajinya sendiri secara berkelompok, peran kiai hanya menyerahkan dan memberi bimbingan sepenuhnya.

5. Metode Majelis ta'lim

Metode ini biasanya bersifat umum, sebagai suatu media untuk menyampaikan ajaran Islam secara terbuka, diikuti oleh jamaah yang terdiri dari berbagai lapisan masyarakat, juga berlatar belakang pengetahuan bermacam-macam dan tidak dibatasi oleh tingkatan usia atau perbedaan kelamin. Pengajian ini dilakukan secara rutin atau waktu-waktu tertentu.

E. Kurikulum Pondok Pesantren Tradisional

Sebagai lembaga pendidikan pesantren menyelenggarakan dapat formal dan pendidikan non formal yang secara khusus mengajarkan agama yang sangat kuat dipengaruhi oleh pikiran-pikiran ulama (kiai). Kurikulum yang dicapai di pondok pesantren terpusat pada pendalaman ilmu-ilmu agama lewat pengajian kitab-kitab klasik dan sikap hidup beragama.

Maka bila kita bicara kurikulum pesantren. Apa yang terjadi dilaksanakan di pesantren mulai dari pagi hingga malam itulah kurikulum pendidikan pesantren.

Untuk melihat kurikulum pendidikan pesantren terlebih dahulu penulis bertolak pada pengklasifikasian pesantren untuk memudahkan klasifikasi pesantren. Rahim (2000: 248) berpendapat bahwa pesantren tradisional (salaf) yaitu pesantren yang pengajarannya masih menggunakan sistem sorogan, wetonan atau bandongan tanpa kelas dan batas umur.

Mengenai bentuk-bentuk pendidikan di pesantren, kini sangat bervariasi yang dapat diklasifikasikan sedikitnya menjadi 5 tipe, yakni:

1. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan formal dengan menerapkan kurikulum nasional.
2. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan keagamaan dalam bentuk madrasah dan mengajarkan ilmu-ilmu umum meski tidak menerapkan kurikulum nasional.
3. Pesantren yang hanya mengajarkan ilmu-ilmu agama dalam bentuk madrasah diniyah.

4. Pesantren yang hanya sekedar menjadi tempat pengajian (majelis ta'lim).
5. Pesantren untuk asrama anak-anak pelajar sekolah umum dan mahasiswa (Azizi, 2002: viii).

Beberapa jenis kurikulum pesantren menurut Wahid (2002: 113-114) antara lain:

1. Kurikulum pengajian non-sekolah, dimana santri belajar pada beberapa orang kiai atau guru dalam sehari semalamnya.
2. Kurikulum sekolah tradisional (madrasah salafiyah), di mana pelajaran telah diberikan di kelas dan disusun berdasarkan kurikulum tetap yang berlaku untuk semua santri.
3. Pondok pesantren, di mana kurikulumnya bersifat klasikal dan masing-masing kelompok mata pelajaran agama dan non agama telah menjadi bagian integral dari sebuah sistem yang telah bulat dan berimbang.

F. Pengertian Madrasah

Istilah madrasah telah dikenal oleh masyarakat muslim sejak masa kejayaan Islam klasik. Dilihat dari segi bahasa, madrasah merupakan *isim makān* (nama tempat) berasal dari kata *darasa* yang berarti tempat orang belajar (Munawir, 1997: 397). Dengan demikian madrasah dipahami sebagai tempat atau lembaga pendidikan Islam.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia madrasah adalah sekolah atau perguruan yang biasanya berdasarkan agama Islam (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994: 611). Madrasah di Indonesia merupakan istilah bagi sekolah agama Islam terutama sekolah dasar dan menengah, sedangkan di

negara-negara Timur Tengah madrasah merupakan sekolah secara umum atau lembaga pendidikan pada umumnya terutama pendidikan tinggi (Poerbakawatja, 1982: 199).

Madrasah juga dinilai berasal dari istilah *al-Madāris*, suatu istilah yang digunakan oleh para *Fuqāha* (Ulama ahli Fiqih), sehingga pada masa kekhalifahan Abbasiyyah, madrasah dianggap sebagai tradisi sistem pendidikan bercorak fiqh dan Hadits (Maksum, 1999: 52).

Di Indonesia, peraturan Menteri Agama RI No. 1/1946 dan No.7/1950 memformulasikan madrasah sebagai berikut:

1. Tempat pendidikan yang diatur sebagai sekolah dan membuat pendidikan dan ilmu pengetahuan agama Islam menjadi pokok pengajaran.
2. Pondok pesantren yang memberikan pendidikan setingkat dengan madrasah (sekolah) (Tim Dirjen Bimbagais Depag, 2003: 22).

Sedangkan menurut SKB (Surat Keputusan Bersama) Tiga Menteri 1975, Madrasah diartikan sebagai; Lembaga pendidikan yang menjadikan mata pelajaran pendidikan agama Islam sebagai mata pelajaran dasar yang diberikan sekurang-kurangnya 30%, di samping mata pelajaran umum.

Akhirnya, dalam realitas di lapangan dapat kita jumpai tiga bentuk madrasah yang bermula dari uraian di atas: Madrasah Diniyah disingkat Madin, Madrasah SKB tiga Menteri dan Madrasah Pondok Pesantren (Tim Dirjen Bimbagais Depag, 2003: 22).

Kemudian dalam UU No. 2 tahun 1989 atau Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN), kedudukan madrasah posisinya sama dengan

sekolah. Hal itu dapat dilihat dalam peraturan perundangan yang membahas mengenai madrasah yang diterbitkan sebagai pelengkap UU tersebut. Di antaranya adalah: PP No. 28 tahun 1990 jo SK Mendikbud No. 0487/U/1992 dan SK No. 054/U/1993 dalam perundangn tersebut disebutkan bahwa MI sama dengan SD dan MTs sama dengan SLTP yang bercirikan agama Islam yang diselenggarakan oleh Departemen Agama. MI dan MTs wajib memberi bahan kajian sekurang-kurangnya sama dengan SD dan SLTP selain ciri Khas agama Islam.

Sedangkan dalam SK Mendikbud No. 0489/U/1992 disebutkan bahwa MA sama dengan SMU bercirikan agama Islam yang diselenggarakan oleh Departemen Agama (Syukur, 2004: 9).

Lebih lanjut dalam UU SISDIKNAS atau UU NO. 20 tahun 2003, di sana sama sekali tidak membedakan antara madrasah dan sekolah, dengan kata lain madrasah adalah sekolah tanpa ada embel-embel berciri khas agama Islam.

Dari penjelasan di atas, kata madrasah mempunyai kata yang sama, yaitu tempat belajar. Jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, kata madrasah memiliki arti sekolah yang pada mulanya kata sekolah itu sendiri bukan sendiri bukan berasal dari bahasa Indonesia, melainkan dari bahasa asing, yaitu school atau scola.

G. Sejarah Madrasah

Dalam Sejarah Islam dikenal banyak sekali tempat dan pusat Pendidikan dengan jenis, tingkatan dan sifatnya yang khas. Ahmad Salabi

menyebutkan tempat-tempat itu sebagai berikut: *al-kutub*, *al-quṣūr*, *al-warāqin*, *manāzil al-‘ulamā’*, *al-bādiyah*, dan madrasah. Ia membagi institusi-institusi pendidikan tersebut menjadi dua kelompok, yaitu kelompok sebelum Madrasah, dan sesudah Madrasah. Madrasah dengan demikian dianggap sebagai tonggak baru dalam penyelenggaraan Pendidikan Islam. Madrasah yang dimaksud adalah Madrasah yang di bangun oleh Nizam al-Mulk, tahun 459 H. Namun demikian ia juga mengatakan bahwa “ institusi-institusi tersebut sebelum Madrasah itu tetap di pakai. Sekalipun jumlah dan peminatnya sedikit (Maksum, 1999: 52). Hal penting yang perlu dicatat dari gambaran di atas ialah bahwa institusi Pendidikan Islam mengalami perkembangan, sesuai dengan kebutuhan dan perubahan masyarakat muslim di kala itu, perkembangan dan kebutuhan masyarakat ditandai oleh:

1. Perkembangan ilmu. Kaum muslimin pada masa awal membutuhkan pemahaman al-Qur'an sebagai apa adanya begitu juga membutuhkan keterampilan membaca dan menulis.
2. Perkembangan kebutuhan pada masa awal yang menjadi kebutuhan utama ialah mendakwakan Islam karena itu sasaran pada mulanya di tujukan pada orang-orang dewasa. Ketika keadaan semakin baik, penganut Islam semakin banyak dan kuat, terdapat kebutuhan pendidikan untuk anak-anak.

Al-Maqrizi menyebutkan bahwa Madrasah merupakan prestasi abad kelima Hijriyah. Ia mengatakan “Madrasah-Madrasah yang timbul dalam Islam, tidak dikenal pada masa sahabat dan tabi’in, melainkan sesuatu yang

baru setelah 400 tahun sesudah Hijriyah”. Madrasah pertama yang didirikan pada abad kelima Hijriyah (11 Masehi) adalah Madrasah Nizamiyah yang didirikan pada tahun 457 H oleh Nizam al-Mulk. Banyak pula penulis kontemporer yang menyimpulkan demikian. Banyak bukti yang signifikan justru menunjukkan bahwa Madrasah telah berdiri pada abad keempat Hijriyah dan dihubungkan dengan penduduk Naisabur. Hasan Abd al-‘Al yang secara khusus melakukan kajian mengenai pendidikan Islam pada abad itu, memperkuat pendapatnya dengan mengajukan bukti-bukti berdasarkan karya penulis-penulis abad keempat sendiri. Beberapa sumber yang ia kutip antara lain *Aḥsan al-Taqsīm fī Ma’rifat al-Aqālim* karya al-Maqdisi (wafat 378 H), *Ṭabaqāt al-Syafi’iyyah al-Kubrā* karya al-Subki (316-388 H), *al-Rasāil* karya Badi’ al-Zaman al-Hamadani (wafat 398 H). Adam Metz, dengan mengutip al-Hakim al-Naisaburi (wafat 406 H/1015 M), pengarang *Tarikh Naisābur*, bahkan menyebutkan bahwa Abi Ishaq al-Isfirayini (wafat 418 H/1027 M) adalah orang pertama yang mendirikan Madrasah di Naisabur (Maksum, 1999: 60).

Tercatat dalam sejarah, bahwa segera setelah wafatnya Rasulullah, persoalan yang pertama timbul dalam Islam adalah persoalan politik. Dari persoalan politik itu kemudian berkembang menjadi persoalan teologi. Ini berarti bahwa persoalan politik timbul mendahului perkembangan pemikiran, atau dengan kata lain yang menjadi pendorong perkembangan pemikiran dalam Islam adalah masalah politik.

Latar belakang sejarah yang demikian itu, ternyata sangat mempengaruhi perkembangan pendidikan dan ilmu pengetahuan dalam Islam pada masa-masa selanjutnya. Dalam hal ini dominasi kepentingan politik telah menentukan bentuk pendidikan dan corak ilmu pengetahuan yang dikembangkan dan diajarkan didalamnya. Diatas telah disinggung latar belakang berdirinya Madrasah Nizamiyah yang dapat menjelaskan hal di atas, dengan dipilihnya model Madrasah dengan corak keilmuan Sunni karena alasan-alasan politik tertentu. Kuatnya pengaruh tersebut juga dapat dipahami dari cara pemikir Islam dalam menjelaskan institusi pendidikan Islam.

Selain itu sejalan dengan perkembangan masyarakat dan sebagai hasil persentuhan dengan kebudayaan lain, berkembang pemikiran-pemikiran di bidang fiqih, hadits, filsafat serta tasawuf. Namun demikian tampak bahwa persoalan politik tetap mempengaruhi dinamika dan pergumulan pemikiran itu. Sejarah Islam memang mencatat bahwa antara aliran pemikiran dan kekuasaan saling mengambil keuntungan (Maksum, 1999: 64).

Seperti yang telah diungkapkan sebelumnya, Madrasah merupakan transformasi dari masjid. Madrasah tetap menampilkan elemen masjid meskipun menunjukkan perubahan dari segi kekhususan dalam penyelenggaraan pendidikan sampai tingkat lanjutan. Secara fisik, Madrasah pada masa abad pertengahan Islam pada dasarnya adalah bangunan masjid yang ditambah dengan lokal-lokal khusus untuk pendidikan (*'iwan*) dan penginapan (pemandokan). Disamping itu, Madrasah mencerminkan transformasi dalam bidang administrasi dan manajemen. Berbeda dengan

masjid, Madrasah telah mengarah pada sistem pengelolaan pendidikan yang lebih profesional.

Madrasah memiliki aturan-aturan tertentu menyangkut hampir seluruh komponen pendidikan. Sebagai contoh jika di masjid seseorang dapat bebas dan tidak terikat dalam memilih guru atau *halāqah*, hal itu tidak dapat lagi dilakukan di Madrasah. Madrasah membedakan tingkatan dan tugas pengajar antara *mudarris* (guru), *mu'îd* (asisten) dan *mu'adz* (tutor). Disamping itu, Madrasah mengenal adanya *nazîr* atau wali yang mempunyai tanggung jawab terhadap aktivitas Madrasah, dan mereka dipilih dari orang-orang yang ahli di bidangnya (Maksum, 1999: 66-67). Jika diamati lebih lanjut ternyata tempat-tempat pendidikan di atas kecuali Madrasah, bukan tempat yang dipersiapkan untuk pendidikan (Fajar, 1999: 54).

Mencermati pola pendidikan pondok pesantren pada tahap awal-awal pertumbuhan dan perkembangannya, pada dasarnya kita mengamati terjadinya peristiwa “okulasi” kebudayaan. Agar lembaga adaptif dengan pranata yang telah ada sebelumnya, maka isi ajaran yang disampaikan selama masa pembelajaran berupa pelajaran Islam yang lebih bercorak mistik.

Tentu dari segi ini ada alasan internal di dalam Islam dan dunia Islam yang sampai ke wilayah Nusantara ini. Secara lambat laun, nuansa mistik ini di pondok pesantren makin berkurang bersamaan dengan semakin dekatnya ke dalam jaringan Islam, ke *Haramain*, tempat sumber yang “asli”.

Para pengamat dan pengkaji keislaman melihat fenomena Islam di pondok pesantren (dan sudah barang tentu juga di Indonesia) terus bergerak ke

arah proses ortodoksi. Atau, pengamat peradaban di Indonesia menyebut adanya proses bergerak dari Islam yang bercorak mistik menuju ke Islam Sunni.

Suatu catatan menarik haruslah diberikan. Bahwasanya, proses bergerak menuju Islam yang lebih Sunni ini pun tidak menampilkan fenomena tunggal. Kita menyaksikan sekali lagi “kebhinekaan” di dalam proses menuju Islam yang lebih Sunni, yang secara tersembunyi maupun kadang secara terang-terangan menampilkan ketegangan dan gesekan kehidupan bermasyarakat ber-*Tamaddun*.

Sementara terjadi proses perubahan isi pembelajaran di dalam format pembelajarannya, persentuhan “global” dengan pusat Islam *haramain* memungkinkan para pelaku pendidikan Islam melihat sistem pembelajaran yang lebih terprogram. Maka tumbuh dan berkembanglah pola pembelajaran pelajaran-pelajaran Islam yang dikelola dengan sistem “*Madrasi*”.

Pengelolaan pendidikan Islam dengan sistem *Madrasi* memungkinkan cara pembelajaran secara klasikal. Hal ini berbeda dengan cara yang berkembang di pondok pesantren yang semula telah membaku, yakni yang bersifat individual seperti terdapat pada sistem *sorogan* dan *wetonan*. Pengelolaan sistem *Madrasi* juga memungkinkan adanya pengelompokan pelajaran-pelajaran tentang pengetahuan Islam yang penyampaiannya diberikan secara bertingkat-tingkat. Pengelompokan ini sekaligus memperhitungkan rentang waktu yang dibutuhkan. Kalau dibahasakan secara teknis pendidikan sekarang, maka sistem *madrasi* mengorganisasikan kegiatan

kependidikannya dengan sistem kelas-kelas berjenjang dengan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pelajaran sudah dipolakan.

Format Madrasah dari waktu ke waktu menjadi semakin jelas sosoknya, sementara isi dan visi keislaman terus mengalami perubahan. Sejak lahir abad ke-19, kepustakaan mencatat perubahan-perubahan pemikiran Islam di Wilayah Nusantara (Indonesia). Hal ini seiring dengan semakin kuatnya proses pembentukan *intellectual web* (jaringan intelektual) di kalangan umat Islam. Jaringan ulama semakin mengentalkan corak Islam murni. Nuansa mistik tentu tidak hilang, namun semakin mendekati kaidah-kaidah Syariah yang lebih Sunni. Hal ini kelak ditandai dengan muncul dan berkembangnya *neosufisme* dalam kehidupan Islam (Fajar, 1999: 20-23).

Dua faktor yang melatarbelakangi pertumbuhan Madrasah di Indonesia secara konkrit adalah adanya desakan politik pendidikan kolonial di semua pihak dan munculnya pembaharuan pemikiran keagamaan di pihak lain. Kolonialisme dapat dikatakan ikut memberi sumbangan bagi pertumbuhan Madrasah atau sekolah Islam di Indonesia karena kebijakan mereka yang menawarkan pola pendidikan yang berbeda dengan sistem pendidikan tradisional. Organisasi dan struktur pendidikan kolonial sedikit banyak diadopsi oleh Madrasah dengan tetap menjaga karakter pendidikan keagamaannya. Pada tahap ini, target dan tujuan sekuler dalam proses pendidikan dijadikan sebagai salah satu muatan dari target dan tujuan pendidikan Islam. Sebelum ini, apa yang disebut dengan pendidikan Islam secara formal tampaknya identik dengan pendidikan keakhiratan.

Bersamaan dengan desakan kolonialisme di atas, perkembangan pemikiran keagamaan di Indonesia pada akhir abad ke-19 telah secara langsung menjadi faktor yang berpengaruh bagi pertumbuhan Madrasah. Para pelaku dan pendukung gerakan pembaharuan pada umumnya memiliki pengalaman pendidikan di Timur Tengah yang sudah menerima pengaruh dari kaum pembaharu Islam seperti Jamaluddin al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Rasyid Ridha. Perhatian mereka di bidang pendidikan diwujudkan dalam gerakan rasionalisasi kelembagaan pendidikan Islam sehingga dapat menjawab tantangan dan kebutuhan zaman yang mendesak. Hal ini membawa pada lahirnya pandangan progresif yang memandang bahwa sistem pendidikan Islam tidak dapat lagi bertumpu pada sistem pendidikan tradisional yang terfokus pada pelajaran agama dan metode hafalan. Bentuk nyata dari pandangan ini adalah pendidikan dan pengembangan Madrasah. Pengembangan madrasah itu dapat dilihat dari perkembangan kurikulum Madrasah di segala tingkatannya, baik yang berkaitan dengan perbandingan prosentase, variasi komposisi, maupun model pemaduan antara mata pelajaran agama, umum dan keterampilan, yang pada gilirannya juga memunculkan keragaman madrasah itu sendiri.

Selain itu, eksistensi madrasah sebagaimana eksistensi pendidikan lainnya dipengaruhi oleh perkembangan eksternal. Namun demikian, disisi lain ia juga mempengaruhi eksternal dimaksud. Hal ini menimbulkan proses dialektika yang terus menerus. Perkembangan Madrasah yang cukup pesat sejak akhir abad 19 dirasakan sangat berperan bagi terbentuknya kelompok

terdidik muslim di Indonesia. Kenyataan ini sampai akhir dekade 1990-an telah ikut menentukan pola hubungan antara agama dan negara yang bersifat simbiotik, keterlibatan umat Islam terdidik dalam tingkat yang cukup penting ke dalam jabatan-jabatan politik menunjukkan hal tersebut, atau berarti semakin pragmatisnya politik Islam sehingga tidak lagi terjebak ke dalam romantisme politik Islam yang idealis.

Namun demikian, karena faktor-faktor lain, sangat boleh jadi perkembangan politik Indonesia pada masa depan akan berubah ke arah format tertentu yang hingga sekarang masih sulit untuk diprediksi. Dengan demikian, bagaimana perkembangan Madrasah di Indonesia pada masa depan juga sangat tergantung pada perkembangan politik mutakhir ini. Sebagaimana semua institusi yang sedang mengalami masa transisi dewasa ini, madrasah pun dituntut untuk mereposisi diri dan sekaligus mengembangkan paradigma baru yang lebih transformatif. Namun bagaimanapun arah dan tren perkembangan madrasah pada masa mendatang, kecenderungannya akan semakin memperkuat eksistensinya sekaligus memperbesar peran pentingnya bagi pertumbuhan masyarakat madani di Indonesia (Fajar, 1999: 163-165).

Dalam peraturan Menteri Agama RI No. 1/1946 dan No. 7/ 1950, Madrasah berarti: a). tempat pendidikan yang diatur sebagai sekolah dan membuat pendidikan dan Ilmu pengetahuan agama Islam menjadi pokok pengajaran, b). pokok dan pesantren yang memberi singkat dengan madrasah. Sementara itu, dalam surat keputusan bersama tiga menteri 1975, Madrasah diartikan sebagai “lembaga pendidikan yang menjadikan mata pelajaran

pendidikan Agama Islam sebagai mata pelajaran dasar yang diberikan sekurang-kurangnya 30%, disamping mata pelajaran umum.” Dengan Madrasah sebagaimana diartikan di atas, pendidikan Islam tidak saja mengajarkan ilmu-ilmu keagamaan, tetapi juga ilmu-ilmu umum dalam jumlah yang cukup banyak.

Dalam kenyataan di lapangan, sistem pendidikan madrasah di Indonesia menampilkan tiga model, 1). Madrasah *diniyah*, 2). Madrasah SKB tiga menteri dan 3). Madrasah pesantren. Madrasah diniyah sepenuhnya mengajarkan ilmu-ilmu agama yang diatur oleh keputusan menteri agama 1964 (Sirodj, 1999: 195).

H. Kurikulum Madrasah

Kurikulum adalah program pengalaman belajar serta hasil-hasil belajar yang diharapkan yang diformulasikan melalui pengetahuan dan kegiatan yang tersusun secara sistematis, diberikan kepada siswa dibawah tanggungjawab sekolah untuk membantu pertumbuhan/perkembangan pribadi dan kompetensi sosial anak didik (Sudjana, 1996: 5-6).

Kurikulum sebagai program pendidikan mencakup sejumlah mata pelajaran atau organisasi pengetahuan, pengalaman belajar atau kegiatan belajar, program belajar untuk siswa dan hasil belajar yang diharapkan /ditaati.

Kurikulum madrasah sebagai pendidikan Islam harus memiliki dua komponen pokok yakni komponen pendidikan umum dan Islam. Karena status madrasah pada semua jenjang disamakan dengan sekolah umum, maka madrasah telah sepenuhnya mengikuti kurikulum yang ditetapkan Depdiknas

(terakhir kurikulum 1994). Dengan penerapan kurikulum 1994 maka isi pendidikan madrasah tidak memiliki perbedaan yang selalu substansial dan substansif dengan sekolah umum. Padahal dipihak lain madrasah sesuai dengan akar eksistensi dan pengalaman historis harus memiliki ciri dan karakter pendidikan Islam. Pembinaan dan pengembangan karakter ciri Islam tersebut sejauh ini kelihatan sulit diwujudkan melalui kurikulum 1994.

Kurikulum 1994 hanya mengalokasikan waktu selama dua jam pelajaran dalam sepekan buat pelajaran agama (Islam). Karena itu madrasah perlu mengembangkan kurikulum pendidikan Islamnya, baik melalui celah “muatan lokal” maupun dengan penambahan waktu belajar yang dikhususkan untuk materi-materi keislaman. Dilihat dari pengelolaan dan pengembangan kurikulum dibedakan antara sistem pengelolaan terpusat (sentralisasi) dan tersebar (desentralisasi).

Madrasah adalah lembaga pendidikan yang merupakan kenyataan hidup di dalam masyarakat. Madrasah di dalam perkembangannya memilih struktur dengan penjenjangan baik secara vertikal, seperti *Rauḍāt al-Aḥfāl*, MIN, MTs, MAN maupun Horizontal dalam bentuk sekolah-sekolah kejuruan seperti PGA, PHIN, PPUPA, Mualimin dan lainnya.

Dengan demikian madrasah bukanlah sekolah kejuruan agama, melainkan bentuk sekolah umum yang menjadi jenjang persekolahan bagi anak didik yang hendak melanjutkan sekolah-sekolahnya dengan disertai keinginan untuk mendalami agama lebih banyak.

Kenyataan demikian menjadi lebih jelas lagi dengan realisasi keputusan Direktur Jendral pendidikan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan No.1.3.049 – Kep. 1974 tertanggal 4 oktober 1974 tentang penerimaan murid pada sekolah-sekolah yang selain dari sekolah dasar untuk tingkatan sekolah lanjutan pertama diterima pula dari Madrasah Tsanawiyah Negeri atau yang sederajat. Kemudian di dalam keputusan menteri P & K RI No.0161 / U / 1974 tertanggal 28 Juli 1975 tentang peraturan Evaluasi Belajar guna memperoleh surat tanda tamat belajar untuk tahun 1975, surat tanda tamat belajar dari madrasah dipersamakan dan diakui sama dengan surat Tanda Tamat Belajar dari sekolah umum yang sederajat.

Kalau diperbandingkan antara tujuan yang ditetapkan pada madrasah (dalam pengelolaan Departemen Agama) dan pada sekolah umum (dalam pengelolaan Departemen P & K), maka keduanya mencantumkan perumusan yang sama.

Pada tingkatan sekolah dasar/Ibtidaiyah menghendaki pemikiran/penguasaan dasar-dasar pengetahuan untuk melanjutkan pendidikan lebih tinggi dan kecakapan atau ketrampilan dasar agar dapat membekali hidup apabila terpaksa harus terjun ke dalam masyarakat.

Pada tingkatan sekolah lanjutan (SMP/SMA dan Tsanawiyah/Aliyah) digunakan agar anak didik meluaskan pendidikan dan pengajaran yang diberikan sekolah rendah untuk mengembangkan cita-cita hidup serta bimbingan kesanggupan murid sebagai anggota masyarakat dan dapat mempersiapkan bagi pendidikan dan pengajaran tinggi

Perbedaannya terletak pada adanya penyertaan agama/bahasa Arab sebagai dasar dan tujuan penguasaan dalam pengenalan dan sikap. Oleh karena itu agar tugas nasional di dalam pendidikan ini dapat diemban oleh dunia madrasah dan oleh sekolah umum diperlukan pendekatan yaitu dengan jalan mengintensifikasi pendidikan umum di madrasah dan mengintensifkan agama di sekolah umum. Guna memenuhi hajat masyarakat akan pendidikan agama yang lebih banyak, jumlah jam pelajaran agama di sekolah umum dapat diemban (Soejoeti, 1999: 5-6).

Kurikulum MIN, MTs dan MA disusun oleh masyarakat kurikulum Direktorat Pendidikan Agama pada tanggal 10 s/d 17 Februari 1973 di Cibogo Bogor, dengan titik tolak dan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

1. Dasar tujuan sekolah yang diterapkan
2. Kurikulum madrasah-madrasah negeri tahun 1971
3. Kurikulum SD, SMP, SMA, tahun 1968

Adapun orientasi dan pendekatannya berdasarkan tujuan yang ditetapkan dengan struktur organisasi terdiri dari susunan mata pelajaran yang diajarkan secara keseluruhan disebutkan di dalam rekapitulasi kurikulumnya.

Masing-masing mata pelajaran ditetapkan tujuan umumnya, bahan pelajarannya. Kegiatan dan petunjuk-petunjuk yang diperlukan serta buku pegangan yang hendak dipakai kemudian barulah diperinci dengan susunan itu pula pada setiap kelas.

Kurikulum 1973 disempurnakan kembali melalui rapat kerja Direktorat Pendidikan tanggal 20 s/d 24 November 1974 dan tanggal 4 s/d 10 Desember

1974. jadi kurikulum MIN, MTsN, MAN yang ada sekarang ini telah mengalami pengembangan dan revisi-revisi yang diperlukan sesuai dengan keadaan pada waktunya.

Keadaan lain dapat dikemukakan disini adalah bahwa sampai akhir tahun 1974, di sekolah-sekolah umum dirasakan adanya problem-problem dengan berbagai kurikulum yang berjalan :

1. Kurikulum tahun 1968
2. Kurikulum menurut sistematika materi pokok buku
3. Kurikulum menurut hasil rapat kerja sukabumi
4. Kurikulum proyek-proyek perintis sekolah pembangunan
5. Kurikulum SMP pembangunan

Kurikulum yang bermacam-macam itu akan disederhanakan sebagaimana digariskan oleh Menteri Pendidikan dan kebudayaan pada rapat koordinasi proyek-proyek perintis sekolah pembangunan (PPSP) seluruh Indonesia tanggal 24 Juli 1974 di Bandungan Semarang, bahwa akan ada 2 kurikulum yang dijalankan pada setiap lembaga pendidikan :

1. Kurikulum di lingkungan PPSP
2. Kurikulum peralihan (transisi) untuk sekolah-sekolah di daerah PPSP

Dalam keterangan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dihadapan rapat kerja dengan DPR tanggal 7 Februari 1974 dikemukakan bahwa pembangunan pendidikan formil ditingkat menengah akan dititik beratkan pada pembangunan kurikulum teknologi, science dan bahasa yang sudah

termasuk dalam kurikulum akan lebih diintensifkan dan diarahkan disamping pengetahuan sosial yang sangat berguna untuk pembangunan.

Berdasarkan pengarahannya tersebut Departemen Pendidikan dan Kebudayaan melakukan serangkaian lokakarya untuk menyusun kurikulum SD, SMP, SMA yang kemudian sekarang ini disebut kurikulum 1975 (Soejoeti, 1999: 5-6) dan tujuan nasionalnya mendidik para siswa untuk menjadi manusia pembangunan sebagai warga Indonesia yang berpedoman pada Pancasila, Bahasa Indonesia, IPS, Keterampilan Matematika, Biologi, Fisika, Kimia (Sudjano, 1991: 90).

Jenis mata pelajaran umum antara madrasah negeri dan sekolah umum negeri adalah sama persis yang membedakan hanya jamnya.

Maka dari itu pendekatan antara sekolah umum dengan madrasah seharusnya dilakukan dengan mempertimbangkan saling mengurangi-menambah mata pelajaran umum dan mata pelajaran agama, sehingga diperoleh dan ditemukan sistem penyelenggaraan pendidikan nasional yang memperhatikan kenyataan hidup di dalam masyarakat. Tujuan peningkatan mutu pendidikan pada madrasah agar tingkat mata pelajaran umum dan madrasah mencapai tingkat yang sama dengan tingkat mata pelajaran umum di sekolah umum yang setingkat. Hasil yang diharapkan adalah :

1. Ijazah madrasah dapat mempunyai nilai yang sama dengan ijazah sekolah umum yang setingkat.
2. Lulusan Madrasah dapat melanjutkan ke sekolah umum setingkat lebih atas
3. Siswa madrasah dapat berpindah ke sekolah umum yang setingkat.

Agar mata pelajaran umum di madrasah mencapai tingkat yang sama dengan tingkat mata pelajaran umum di sekolah umum, dilakukan peningkatan-peningkatan di bidang:

1. Kurikulum
2. Buku pelajaran, alat pendidikan lainnya dan sarana pendidikan pada umumnya
3. Pengajar

Dalam keistimewaan madrasah SKB tiga Menteri adalah diakuinya madrasah SKB tiga Menteri setaraf dengan sekolah-sekolah umum yang setingkat. Atas dasar itulah maka tamatan madrasah tidak lagi hanya semata-mata diperuntukkan untuk melanjutkan studi ke IAIN tetapi juga telah berhak untuk melanjutkan pelajarannya ke berbagai fakultas lainnya pada lingkungan universitas umum (Daulani, 2001: 83-84).

Kemudian kegiatan yang dilakukan agar ada kesetaraan antara madrasah dan sekolah maka perlu adanya pengadaan buku dan alat-alat pendidikan lainnya penataran dan pengadaan tenaga guru serta bantuan rehabilitas gedung sekolah.

Kedudukan kurikulum adalah sebagai terjemah pertama dari tujuan-tujuan yang harus dicapai oleh sekolah dan berfungsi sebagai pemberi arah dan pengembangan kurikulum selanjutnya.

Dalam perbandingan kurikulum madrasah dengan kurikulum sekolah-sekolah umum penulis sengaja menggunakan kurikulum 1975 sebagai dasar perbandingan karena mulai tahun 1976 mulai dengan kelas 1 dan IV untuk

tingkat SD, kelas 1 untuk tingkat SMP dan SMA akan berlaku kurikulum 1975 tersebut. Dalam keputusan Bersama Tiga Menteri yang akan peneliti perbandingan hanya terbatas pada alokasi waktu yang disediakan pada pelajaran non agama pada madrasah maupun sekolah umum dan sedikit ulasan perbandingan tentang materi pelajaran yang telah dipilih oleh masing-masing kurikulum. Yang dimaksud pelajaran umum adalah bidang-bidang studi berikut :

1. Bahasa Indonesia
2. Pendidikan mortal Pancasila dan ilmu pengetahuan sosial
3. IPA
4. Matematika
5. Olahraga dan Kesehatan
6. Kesenian
7. Ketrampilan

Pada SD kurikulum 1975 hanya merencanakan sejumlah 8 jenis pelajaran sedangkan MI 12 pelajaran. Pada SMP direncanakan setiap minggunya 12 pelajaran, sedangkan pada MTs 22 pelajaran. Pada SMA sekitar 8 sampai 12 pelajaran perminggu, sedangkan pada Madrasah Aliyah 21 pelajaran perminggunya. Kurikulum 1975 mungkin mengurangi jumlah pelajaran yang diberikan perminggunya karena menggunakan organisasi pelajaran yang berorientasi kepada bidang-bidang studi.

Perbandingan antar SMA IPA (paspal) dengan MA masih menggunakan, IPA, IPS dan bahasa. Kurikulum 1975 akan menggunakan

pokok-pokok materi yang baru dalam pemberian pelajaran IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial) bahan-bahan baru untuk pelajaran bahasa.

Kurikulum yang bagaimanapun merupakan lembaga Islam seharusnya memiliki dua komponen pokok, yakni komponen pendidikan umum dan komponen pendidikan Islam karena status madrasah pada semua jenjang telah disamakan dengan sekolah umum, maka komponen pendidikan umum madrasah telah sepenuhnya mengikuti kurikulum yang ditetapkan Depdiknas (terakhir adalah kurikulum 1994). Dengan penerapan ini maka isi pendidikan madrasah tidak memiliki perbedaan yang terlalu substansial dan substantif dengan sekolah umum (Azra, 2002: 12).

Struktur kurikulum madrasah memuat jenis-jenis mata pelajaran dan penjatahan waktu yang dialokasikan bagi setiap mata pelajaran yang terdapat dalam struktur kurikulum madrasah masing-masing, yaitu pada dasarnya struktur kurikulum madrasah sama dengan kurikulum sekolah umum.

Perbedaannya pada mata pelajaran pendidikan agama, baik jenisnya maupun alokasi waktunya. Pendidikan agama di sekolah umum diberikan waktu 2-3 jam, sedangkan di madrasah sekitar antara 7 sampai 12 jam pelajaran untuk setiap minggunya (Shaleh, 2004: 195-196).